

KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN SUB KEGIATAN/ OUTPUT TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2012-2014
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> Persentase berfungsinya instansi pemerintah yang mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Persentase penurunan instansi pemerintah yang tugas, fungsi dan kewenangannya tumpang tindih Persentase IP yang melaksanakan mekanisme tata hubungan kerjanya dengan baik 	1.1	Mewujudkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	<ul style="list-style-type: none"> Persentase instansi pemerintah yang telah memenuhi tingkat kesesuaian jenis dan sifat organisasi; Persentase penurunan overlapping antarinstansi pemerintah; Persentase struktur organisasi sesuai dengan fungsinya; Persentase struktur organisasi sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja; 	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman mengenai evaluasi/audit organisasi (tepat fungsi, tepat ukuran, jenis dan sifat organisasi, dan kewenangan); Pedoman penataan organisasi; Jumlah IP yang dievaluasi/diaudit organisasinya Jumlah instansi pemerintah yang melakukan penataan organisasi berdasarkan tepat fungsi dan tepat ukuran; Formalisasi penataan organisasi; 	1	1	-	Asdep Perumusan Kebijakan Kelembagaan
							1	1	-	Asdep Perumusan Kebijakan Kelembagaan
							40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota	40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota	16 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota	Di bagi pada kegiatan Asdep Bidang Polhukam, Perekonomian I, Perekonomian II (untuk K/L), sedangkan (untuk Daerah) pada bidang Kesra
							40 K/L	40 K/L	16 K/L	Di bagi pada kegiatan Asdep Bidang Polhukam, Perekonomian I, Perekonomian II (untuk K/L masing 10 K/L), sedangkan (untuk Daerah) pada bidang Kesra
							40 K/L	40 K/L	16 K/L	Di bagi pada kegiatan Asdep Bidang Polhukam, Perekonomian I, Perekonomian II (untuk K/L masing 10 K/L), sedangkan (untuk Daerah) pada bidang Kesra(Formulasi ini merupakan bagian dari penataan)

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang administrasi SARPRASnya baik. 			<ul style="list-style-type: none"> Persentase instansi pemerintah yang telah memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan. 					
			1.2.	Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang melaksanakan mekanisme tata hubungan kerja internal Persentase IP yang melaksanakan mekanisme tata hubungan kerja eksternal Persentase IP yang telah melaksanakan analisis kebutuhan SARPRAS secara periodik Persentase IP yang melaksanakan pengadaan 	<ul style="list-style-type: none"> RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah RUU Administrasi Pemerintahan PP tentang izin, dispensasi, dan konsesi Pedoman tentang kebijakan tatalaksana sarana dan prasarana kerja aparatur Kebijakan tentang kendaraan dinas dan fasilitas dinas 	1 RUU 1 RUU Draft 1 1 Permen 1 Perpres	1 UU 1 UU Draft 2 1 Permen -	- - PP dan sosialisasi - -	Asdep Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Asdep Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Asdep Pengembangan Sistem Prosedur Pemerintahan Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					sesuai analisis kebutuhan SARPRAS • Persentase IP yang administrasi SARPRASnya baik.	• Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi kebijakan tata laksana SARPRAS kerja aparatur • Jumlah laporan hasil implelementasi kebijakan tatalaksana SARPRAS kerja aparatur	- 1 Laporan	25% 1 Laporan	50% 1 Laporan	Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana Asdep Standardisasi Sarana dan Prasarana
2	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif	• Persentase PNS yang menduduki jabatan sesuai dengan prasyarat administrasi dan kompetensi jabatan; • Persentase PNS yang telah memiliki sertifikat kompetensi; • Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka;	2.1	Terwujudnya perencanaan SDM aparatur secara nasional	• Jumlah instansi yang telah melakukan perencanaan SDM	• RPP formasi PNS • instansi yang telah menyusun perencanaan SDM • instansi yang telah melakukan analisis jabatan dan beban kerja • Perencanaan SDM aparatur secara nasional	1 PP 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab. dan 33 Kota 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab dan 33 Kota	- 36 K/L, 50 Kab dan 50 Kota 36 K/L, 50 Kab dan 50 Kota	- 1 Dok.	Asdep Perencanaan SDM Aparatur Asdep Perencanaan SDM Aparatur Asdep Perencanaan SDM Aparatur Asdep Perencanaan SDM Aparatur
			2.2	Mewujudkan sistem rekrutmen yang terbuka dan independen	• Persentase IP yang telah menerapkan sistem rekrutmen terbuka; • Persentase penurunan permasalahan pada proses	• RPP penyempurnaan PP 98/200 jo PP 11/2002 • Konsorsium dengan PTN dalam penyusunan soal dan pelaksanaan seleksi CPNS	1 PP 1 Naskah	-	-	Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur Asdep Perencanaan SDM Aparatur

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					rekrutmen PNS.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan seleksi CPNS Laporan pengaduan pengadaan CPNS 	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	Asdep Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur
			2.3	Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah IP yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka dan berbasis kompetensi; Persentase instansi pemerintah yang memiliki standar kinerja individu; Persentase PNS yang telah mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan; Persentase pejabat yang memiliki kesesuaian dengan prasyarat administrasi dan kompetensi jabatan; 	<ul style="list-style-type: none"> R-Perpres tentang penilaian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural RPP perubahan PP 100/2000 jo PP 13/2002 Jumlah instansi pemerintah yang sudah memiliki standar kompetensi dan persyaratan jabatan Jumlah instansi yang sudah melaksanakan PP 46/2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS; Persentase IP yang melakukan evaluasi kinerja individu 	1 Perpres			Asdep Pengembangan SDM Aparatur
							1 PP			Asdep Pengembangan SDM Aparatur
							10 Instansi	15 Instansi		Asdep Pengembangan SDM Aparatur
							10 K/L 10 Pemda	15 Instansi		Asdep Pengembangan SDM Aparatur
							50%	75%	100%	Asdep Pengembangan SDM Aparatur

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2.4	Terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase PNS yang telah mengikuti diklat lebih dari 10% jam kerjanya Persentase PNS yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Persentase IP yang telah melaksanakan evaluasi kebutuhan diklat. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase PNS per instansi pemerintah sesuai PP yang telah memiliki sertifikat kompetensi RPP penyempurnaan PP 101/2000 tentang Diklat Jabatan PNS (10% jam kerja) Jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan analisis kebutuhan diklat Pedoman standarisasi jabatan struktural Pedoman standarisasi jabatan fungsional Revisi PermenPANRB tentang jabatan widyaiswara Penguatan kualitas dan kuantitas widyaiswara/ tenaga pengajar/ instruktur 	50%	60% %	70%	Asdep Pengembangan SDM Aparatur Asdep Pengembangan SDM Aparatur Asdep Pengembangan SDM Aparatur Asdep Pengembangan SDM Aparatur Asdep Pengembangan SDM Aparatur Asdep Pengembangan SDM Aparatur

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2.5	Terwujudnya sistem remunerasi berbasis jabatan dan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan tunjangan berdasarkan pada kinerja; Persentase peningkatan penerimaan pensiun 	<ul style="list-style-type: none"> instansi pemerintah yang telah melakukan evaluasi jabatan data instansi pemerintah yang telah menerima tunjangan kinerja RPP penyempurnaan PP 7/1977 tentang Gaji Kebijakan tentang sistem dan anggaran untuk SDM yang mengundurkan diri khususnya yang kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi 	40 K/L, 33 Prov, 33 Kab dan 33 Kota	210 Kab/Kota		Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur
							40 K/L, 33 Prov, 33 Kabupaten dan 33 Kota	210 Kab/Kota		Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur
							1 RPP	1 PP		Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur
							1 Draf	1 keb.		Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur
3	Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan <i>national public complaint handling system</i>; 	3.1	Mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang telah menerapkan TIK dalam manajemen pelayanannya; Persentase IP yang telah menerapkan GRMS dengan BAIK; 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pelayanan publik yang berbasis TIK (<i>Open Government System</i>) Persentase IP yang telah melaksanakan <i>Open Government System</i> dalam pelayanan publik 	1	1	-	Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik
							5%	10%	20%	Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan <i>no wrong door</i>; Persentase IP yang telah menerapkan <i>GRMS</i> dengan BAIK; Skor integritas pelayanan publik; Skor IKM rata-rata nasional ; Persentase IP yang memiliki nilai PMPRB baik 				<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan sistem manajemen sumber daya pemerintah Persentase IP yang telah melaksanakan sistem manajemen sumber daya pemerintah Evaluasi pelaksanaan sistem manajemen sumber daya pemerintahan 	1			Asdep Pengembangan Sistem Administrasi Umum Pemerintahan
			3.2	Mewujudkan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan <i>national public complaint handling system</i>; Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan <i>no wrong door</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan tentang <i>national public complaint handling system</i> yang terintegrasi; Persentase IP yang telah diberikan sosialisasi pelaksanaan <i>national public complaint handling system</i> yang dievaluasi Persentase IP yang telah melaksanakan <i>National Public Complaint Handling Mechanism</i> 	-	1	-	Asdep Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan
							-	100%	-	Asdep Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan
								5%	10%	Asdep Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kebijakan tentang <i>No Wrong Door Policy</i> Persentase IP yang telah melaksanakan <i>No Wrong Door Policy</i> 	1	10%	20%	Asdep Pelayanan Perekonomian Asdep Pelayanan Perekonomian
			3.3	Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya	<ul style="list-style-type: none"> Skor IKM rata-rata nasional Skor integritas nasional Skor <i>ease doing business</i> Persentase Pemda yang menerapkan OSS Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Standar Pelayanan Publik Jumlah K/L dan instansi pemerintah Provinsi yang dinilai dalam rangka pemeringkatan Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan pelaksanaan UU 25/2009 dalam bentuk PP, Permenpan, Perpres; Jumlah IP yang diberikan sosialisasi/ bimbingan teknis terkait PP/Permenpan turunan UU 25/2009; Jumlah IP yang menerapkan Standard Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Kebijakan pemeringkatan pelayanan publik Pelaksanaan pemeringkatan pelayanan publik/Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik 	2 50 20 IPP 99 Pemda 1 75 K/L dan 33 Prov	2 200 70 IPP 165 Pemda 2 98 Kota	1 (sisanya) Seluruh K/L dan Pemda - 199 Kab	Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Asdep Pengembangan dan Standardisasi Pelayanan Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3.4	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang memiliki nilai PMPRB baik Tingkat efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan tentang penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Persentase IP yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi Persentase IP yang sudah menerapkan PMPRB Persentase Pemda yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi Jumlah IP yang mengikuti capacity building dalam rangka penerapan PMPRB 	6 80%K/L 36 K/L 100% Prov 10% Kab/kota 100% Prov 10% Kab/kota	3 100% K/L 76 K/L 33 Prov 33 Kab 33 Kota 100% Prov 30% Kab/kota 100% Prov 30% Kab/kota	3 100% K/L 76 K/L 33 Prov 90 Kab 33 Kota 100% Prov 60% Kab/kota 100% Prov 60% Kab/kota	<p>Asdep Perumusan Kebijakan Program PAN dan RB</p> <p>Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program PAN dan RB Pusat</p> <p>Di pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Pusat, sedangkan di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Daerah</p> <p>Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program PAN dan RB Daerah</p> <p>Di pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Pusat, sedangkan di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Daerah</p>
4	Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang mendapat opini WTP; Persentase IP yang telah berstatus WBK; Persentase IP yang akuntabel 	4.1	Terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas dan disiplin	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS; Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS; 	<ul style="list-style-type: none"> instansi pemerintah yang jumlah pelanggaran konflik kepentingannya turun instansi pemerintah yang jumlah pelanggaran disiplin dan etikanya turun 	10% 10%	10% 10%	10% 10%	<p>Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur</p> <p>Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur</p>

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<ul style="list-style-type: none"> • IPK • Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS 			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketentuan tentang konflik kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang konfirmasi kepada PPATK dalam promosi jabatan; • SE Menteri tentang larangan bagi PNS untuk menjalankan unit usaha; • Permenpan tentang kewajiban menyampaikan LHKASN; • SE Menteri tentang pelaporan LHKASN sebagai dasar dalam kenaikan pangkat; 	1			Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
							1			Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur
							1			Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi
							1			Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi
			4.2.	Meningkatnya IP yang akuntabel	•Persentase IP yang akuntabilitasnya BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah evaluasi; • Kebijakan tentang penyampaian PK dan LAKIP; • RUU AKPN; • Penyusunan sistem informasi akuntabilitas; • Kebijakan tentang penguatan akuntabilitas; 	1	1	1	Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas
							1	1	1	Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas
							Draft 1	Draft 2	1 UU	Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas
							1	1	-	Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas
							1	1	1	Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<ul style="list-style-type: none"> Persentase IP yang menyerahkan LAKIP; Persentase IP yang menyerahkan PK; Persentase IP yang menyerahkan IKU; Persentase IP yang melakukan evaluasi kinerja internal; Laporan hasil evaluasi 	<p>100% K/L, 80% Pemda</p> <p>100% K/L, 60% Pemda</p> <p>80% K/L, 40% Pemda</p> <p>50% K/L, 25% Pemda</p> <p>82 Lap K/L, 66 Lap Pemda</p>	<p>100% K/L, 82% Pemda</p> <p>100% K/L, 65% Pemda</p> <p>82% K/L, 45% Pemda</p> <p>70% K/L, 30% Pemda</p> <p>82 Lap K/L, 66 Lap Pemda</p>	<p>100% K/L, 85% Pemda</p> <p>100% K/L, 70% Pemda</p> <p>85% K/L, 50% Pemda</p> <p>80% K/L, 35% Pemda</p> <p>82 Lap K/L, 66 Lap Pemda</p>	<p>Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah</p> <p>Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah</p> <p>Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah</p> <p>Di Pusat oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat, di daerah oleh Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah</p>

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			4.3.	Terwujudnya IP yang bersih dan bebas KKN	<ul style="list-style-type: none"> • IPK • Persentase IP yang memperoleh opini WTP • JUmlah IP yang memperoleh predikat WBK • Persentase penurunan kejadian penyimpangan material terhadap peraturan perundang-undangan. • Persentase IP yang pengendalian internalnya memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permenpan tentang penguatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi; • Permenpan tentang wilayah bebas korupsi; • RUU Etika penyelenggaraan pemerintahan; • RUU Administrasi pemerintahan; • RUU PPAP; • Kebijakan tentang pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan; • Kebijakan tentang sistem pengendalian internal; • Kebijakan tentang standar audit; • APIP yang melaporkan hasil pengawasan; 	1	1		Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
							1			Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi
							Draft1	Draft2	1 UU	Asdep Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan
							Draft2	Draft2	1 UU	Asdep Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan
							Draft 1	Draft 2	1 UU	Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
							1	-	-	Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
							1	-	-	Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
							1	-	1	Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
							40 K/L, 33 prov, 33 kab, 33 kota	40 K/L, 33 prov, 33 kab, 33 kota	50 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota	Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<ul style="list-style-type: none"> • APIP yang telah melaksanakan KESA; • IP yang telah melaksanakan SPI sesuai ketentuan; • Persentase model Island of Integrity yang berhasil; • Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas; • Persentase penyampaian LHKPN; • Penerapan zona integritas; • Persentase penyampaian LHKASN. 	40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 60% K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 40% 100% K/L, 33 Prov, 330 Kab/Kota 80% 40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 5%	40 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 60% K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kota 42% 167 Kab/Kota 85% 27 K/L, 85 Kab/Kota 15%	50 K/L, 33 Prov, 200 Kab/Kota 70% K/L, 33 Prov, 200 Kab/Kota 45% - 90% 33 K/L, 85 Kab/Kota 30%	Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Asdep Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi
5.	Mewujudkan aparatur Kementerian PAN dan RB yang	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya wilayah bebas korupsi di Kementerian 	5.1	Terwujudnya organisasi Kementerian PAN dan RB yang efektif dan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesesuaian organisasi dengan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil evaluasi organisasi; • Laporan hasil evaluasi penerapan SOP; 	1 1	1 1	1 1	Biro Perencanaan Biro Perencanaan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	profesional dan berkinerja tinggi	PAN dan RB; • Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja; • Nilai PMPRB; • Rerata nilai kinerja individu • Opini BPK; • Tingkat persepsi masyarakat terhadap citra Kementerian PAN dan RB.		efisien	organisasi; • Jumlah unit kerja yang menerapkan SOP; • Persentase tingkat capaian kinerja.	• Permenpan-RB tentang Instrumen monev SOP; • LAKIP • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	-	-	Biro Perencanaan
							1	1	1	Biro Perencanaan
							1	1	1	Inspektorat
			5.2	Terwujudnya SDM Kementerian PAN dan RB yang profesional dan kompetitif	• Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan; • Persentase pejabat fungsional yang telah mengikuti Diklat sebanyak 10% dari waktu kerja setahun; • Persentase penurunan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan etika; • Persentase pegawai yang memperoleh nilai SKI BAIK; • Persentase pengisian	• Laporan hasil pemetaan kompetensi pegawai; • Data kompetensi pegawai; • Data kompetensi pegawai yang dimutakhirkan; • Rencana dan program peningkatan kompetensi pegawai; • Laporan hasil peningkatan kompetensi pegawai; • Laporan hasil penindakan pelanggaran disiplin dan etika; • Kebijakan tentang Instrumen pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi	1	-	-	Biro Umum
							1	-	-	Biro Umum
							-	1	1	Biro Umum
							1	-	-	Biro Umum
							1	1	1	Biro Umum
							1	1	1	Biro Umum
							1	-	-	Biro Umum

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					jabatan secara terbuka.	<ul style="list-style-type: none"> • Data pegawai yang memperoleh penghargaan; • Laporan pengisian jabatan secara terbuka; • Penyusunan standar kinerja pegawai • Evaluasi kinerja pegawai; • Dokumen Perencanaan Pegawai • Dokumen Standar Kompetensi Jabatan 	1	1	1	Biro Umum
							1	1	1	Biro Umum
							1			Biro Umum
								1		Biro Umum
							1			Biro Umum
							1			Biro Umum
			5.3	Mewujudkan KemPAN dan RB yang akuntabel dan bebas dari KKN	<ul style="list-style-type: none"> • Opini BPK; • Persentase penurunan jumlah temuan BPK; • Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti; • Persentase pegawai yang menyerahkan LHKPN; • Nilai hasil evaluasi akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Pedoman Reviu LK; • Reviu LK; • Audit/ evaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan; • Pembinaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan; 	1	1	1	Inspektorat
							2	2	2	Inspektorat
							5	6	7	Inspektorat
							7	7	7	Inspektorat

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					kinerja;	• Penyusunan Pedoman inventarisasi aset;	1	1	1	Biro Umum
						• Inventarisasi aset;	1	1	1	Biro Umum
						• Laporan hasil TLHP;	1	1	1	Inspektorat
						• Data pegawai yang melaporkan/ menyampaikan LHKPN;	1	1	1	Biro Umum
						• Bimbingan teknis akuntabilitas kinerja unit kerja;	2	2	2	Biro Perencanaan/Inspektorat
						• Reviu IKU;	1	1	1	Biro Perencanaan/Inspektorat
						• Penyusunan Juklak evaluasi internal;	1	1	1	Inspektorat
						• Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja;	7	7	7	Inspektorat
						• Penyusunan juklak evaluasi kinerja;	1	1	1	Inspektorat
						• Reviu kinerja unit kerja;	7	7	7	Inspektorat
			5.4	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PAN dan RB	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai PMPRB • Tingkat persepsi masyarakat terhadap Kementerian PAN dan RB 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai PMPRB • Survey persepsi masyarakat • Jumlah Pencitraan melalui media 	≥70 1 7	≥75 2 10	≥80 2 15	Seluruh Unit Kerja Biro Hukum dan Humas Biro Hukum dan Humas

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN/OUTPUT	2012	2013	2014	PEMBAGIAN KEGIATAN ESELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan manajemen dokumentasi 	6	8	10	Biro Hukum dan Humas
			5.5	Terwujudnya penerapan e-Government di Kementerian PAN dan RB	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Pemenuhan kebutuhan sistem teknologi informasi internal di Kementerian PAN dan RB 	Jumlah sistem yang terintegrasi dalam data base management system Kementerian PAN dan RB	6	10	10	Biro Hukum dan Humas

Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi